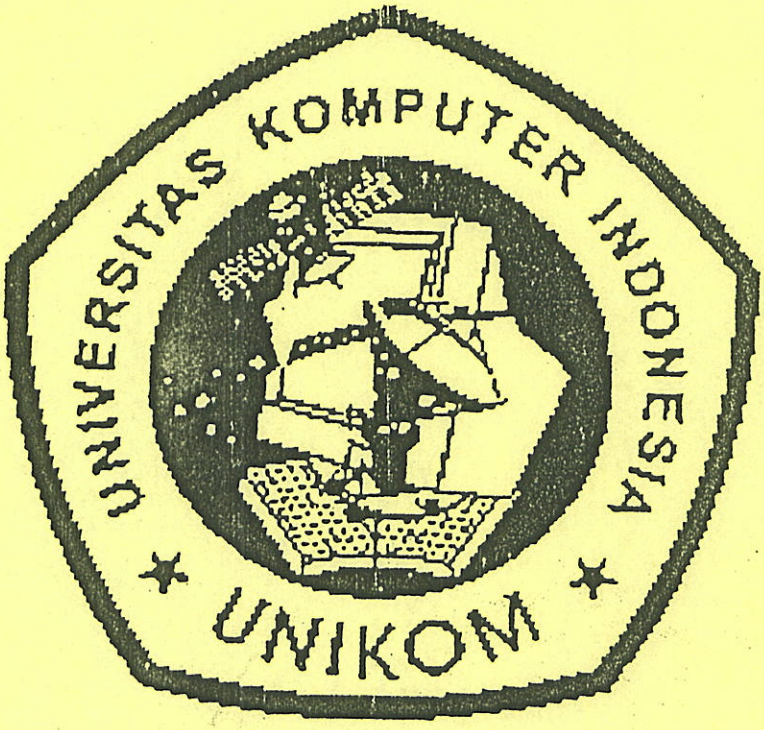
DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Revisi Tahun 2001*, Penerbit Andi Yogyakarta, 2001.

Departemen keuangan R.I. direktorat Jenderal pajak, Buku Petunjuk pengisian SPT PPH Wajib Pajak Badan, Penerbit Departemen keuangan, 2000.

Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-35/PJ/2000 (lampiran 2), tentang Tata Cara pengolahan SPT.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran I

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR
1771

PERHATIAN :
- BACA BUKU PETUNJUK PENGISIAN
- ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK
- DIISI DENGAN LENGKAP, BENAR, DAN JELAS

TAHUN PAJAK

- BERI TANDA X DALAM ☐ (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN : ☐ TAHUN TAKWIM ☐ TAHUN BUKU ..... S.D .....

DIISI OLEH DINAS

1. TGL SPT DISAMPAIKAN .....
2. STATUS SPT ☐☐
3. KLASIFIKASI BADAN ☐
4. ALAT PEMB ☐
5. N/KL (M.10) ☐
6. N/KL (N.12) ☐
7. PERMOHONAN ATAS LB ☐
8. LAMPIRAN ☐
9. Kode KLU ☐☐☐☐

A. N P W P : ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐

B. NAMA WAJIB PAJAK :

C. ALAMAT TEMPAT KEDUDUKAN :

D. KELURAHAN/KECAMATAN :

E. KOTA/KODE POS : ☐☐☐☐

F. JENIS USAHA : .....

G. NAMA PIMPINAN :
ALAMAT RUMAH :
NOMOR TELEPON : RUMAH ..... KANTOR .....

H. KLASIFIKASI BADAN : ☐ PT / MODAL VENTURA ☐ YAYASAN / BANK ☐ KOPERASI / REKSADANA ☐ DANA PENSIUN / LAINNYA

I. PEMBUKUAN : ☐ KAS / AKRUAL ☐ MANUAL / KOMPUTER
: ☐ BAHASA INDONESIA / BAHASA INGGRIS ☐ RUPIAH / DOLLAR AS
CARA PENILAIAN PERSEDIAAN : ☐ RATA RATA / FIFO
METODE PENYUSUTAN : ☐ GARIS LURUS / SALDO MENURUN
AMORTISASI : ☐ GARIS LURUS / SALDO MENURUN

			DIISI DALAM RUPIAH
J. PENGHASILAN NETO	1.	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI (DIISI DARI 1771-I BAGIAN D NOMOR 5)	
	2.	PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (DIISI DARI 1771-II KOLOM 5)	
	3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2)	
K. PENGHASILAN KENA PAJAK	4.	KOMPENSASI KERUGIAN	
	5.	PENGHASILAN KENA PAJAK (3 - 4)	
L. PPh TERUTANG	6.	PPh TERUTANG (TARIF PPh PASAL 17 X ANGKA 5)	
	7.	PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	
	8.	JUMLAH PPh YANG TERUTANG (6 + 7)	
M. KREDIT PAJAK	9.	PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH (DIISI DARI 1771-II DAN 1771-III)	
	10.	a. ☐ PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. ☐ PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT (8 - 9)	
	11.	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 (a) b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK) (b) c. FISKAL LUAR NEGERI (c) d. PPh PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (d) JUMLAH (a + b + c + d) ..... >	
N. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR	12.	a. ☐ PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) b. ☐ PPh YANG LEBIH BAYAR (PPh PASAL 28A) (10 - 11)	
		● JUMLAH PADA ANGKA 12a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL	

O. PERMOHONAN	13.	JUMLAH PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 12 b MOHON : ☐ DIRESTITUSIKAN ☐ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK YANG AKAN DATANG	13
P. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	14.	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR Rp JUMLAH TERSEBUT DIHITUNG BERDASARKAN : a. ☐ 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 10a - 7 b. ☐ PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI CATATAN : TIDAK DIISI OLEH WP BANK , SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BUMN/BUMD, DAN WP TERTENTU LAINNYA	
Q. LAMPIRAN	15.	SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771 V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a. ☐ NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI TAHUN PAJAK YANG BERSANGKUTAN b. ☐ PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA c. ☐ SURAT SETORAN PAJAK PPh PASAL 29 TAHUN ..... d. ☐ SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN) e. ☐ DAFTAR PENGHITUNGAN PENYUSUTAN/AMORTISASI f.	
R. PERNYATAAN	16.	DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP DAN JELAS. ....., TGL. ..... 20 ..... ☐ PENGURUS TANDA TANGAN ☐ KUASA NAMA TERANG	

● PEMBETULAN IDENTITAS		
A. NPWP	:	☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. A L A M A T	:	
D. KELURAHAN/KECAMATAN	:	
E. KOTA/KODE POS	:	☐☐☐☐☐
● TANDA TANGAN PENGURUS/ KUASA :		

KP. PPh. 2.2 - 99

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR 1771-I

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN DARI LUAR USAHA
● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

TAHUN PAJAK

NAMA WAJIB PAJAK : ..... NPWP :

BAGIAN A : PENGHASILAN DARI USAHA (DALAM RUPIAH)

NO.	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA	HARGA POKOK PENJUALAN	LABA BRUTO USAHA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DAGANG			
2.	INDUSTRI			
3.	JASA			
4.	LAIN-LAIN			
	JUMLAH			

BAGIAN B : PENGHASILAN DARI LUAR USAHA (DALAM RUPIAH)

NO.	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO
(1)	(2)	(3)
1.	BUNGA	
2.	DIVIDEN	
3.	ROYALTI	
4.	SEWA	
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	
6.	LAIN-LAIN	
	JUMLAH	

BAGIAN C : PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO (DALAM RUPIAH)

NO.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	GAJI, UPAH, BONUS, HADIAH, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	
2.	PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	
3.	CADANGAN	
4.	PIUTANG TIDAK DAPAT DITAGIH	
5.	BUNGA PINJAMAN, SEWA, ROYALTI, IMBALAN JASA	
6.	KERUGIAN KARENA PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	
7.	NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DI DAERAH TERPENCIL	
8.	LAIN-LAIN	
	JUMLAH	

BAGIAN D : PENGHASILAN NETO (DALAM RUPIAH)

NO.	U R A I A N	J U M L A H
(1)	(2)	(3)
1.	PENGHASILAN DARI USAHA (JUMLAH BAGIAN A KOLOM (5))	
2.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA (JUMLAH BAGIAN B)	
3.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 + 2)	
4.	PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO (JUMLAH BAGIAN C)	
5	PENGHASILAN NETO (3 - 4)	

CATATAN : PINDAHKAN JUMLAH BAGIAN D NOMOR 5 KOLOM (3) KE FORMULIR 1771 HURUF J ANGKA 1

KP. PPh. 2.2.1 - 99

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

FORMULIR 1771-II

TAHUN PAJAK

NAMA WAJIB PAJAK : ..... NPWP :

NO.	PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK		PPh PASAL 22 (Rp)	PPh PASAL 23 (Rp)	PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH (Rp)
	NAMA	NPWP			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JUMLAH : .....>					

CATATAN : (1) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4) + (5) + (6) DITAMBAH DENGAN PENJUMLAHAN KOLOM (7) FORMULIR 1771-III KE FORMULIR 1771 HURUF M ANGKA 9

(2) JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.

KP. PPh. 2.2.2 - 99

LAMPIRAN - III

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR

1771-III

TAHUN PAJAK

PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG DI LUAR NEGERI

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIB PAJAK : .....

NPWP : | | | | | | | | | | | | | | | |

NO.	NEGARA SUMBER PENGHASILAN	NAMA DAN ALAMAT PEMOTONG PAJAK DI LUAR NEGERI	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO (Rp)	PAJAK YANG DIBAYAR/ TERUTANG DI LUAR NEGERI (Rp)	PPh PASAL 24 *) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	JUMLAH : .....>					

*) PERMOHONAN : JUMLAH PADA KOLOM (7) MOHON DIPERHITUNGKAN SEBAGAI KREDIT PAJAK

CATATAN : (1) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (5) KE FORMULIR 1771 HURUF J ANGKA 2
(2) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (7) DITAMBAH DENGAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4) + (5) + (6) FORMULIR 1771-II KE FORMULIR 1771 HURUF M ANGKA 9
(3) JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

KP. PPh. 2.2.3-99

5

LAMPIRAN - IV

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR
1771-IV

TAHUN PAJAK

DAFTAR PENERIMA DIVIDEN, BONUS, TANTIEM, DAN GRATIFIKASI
● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIB PAJAK : .....

NPWP :

NO.	NAMA DAN ALAMAT	N P W P	DIVIDEN (Rp)		BONUS (Rp)	TANTIEM (Rp)	GRATIFIKASI (Rp)
			PERSAHAM	JUMLAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT FORMULIR TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.

KP. PPh 2.2.4 - 99

LAMPIRAN - V

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

1771-V

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA KOPERASI

DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL, DAFTAR CABANG/ BADAN ANGGOTA KOPERASI

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIB PAJAK : ..... NPWP

BAGIAN A : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA KOPERASI

NO.	NAMA DAN ALAMAT	N P W P	J A B A T A N
(1)	(2)	(3)	(4)

BAGIAN B : DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL

NO.	NAMA DAN ALAMAT	N P W P	JUMLAH SAHAM DISETOR		
			LEMBAR	RIBUAN RUPIAH	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

CATATAN :
UNTUK PERUSAHAAN MASUK BURSA HANYA DIMASUKKAN PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI SAHAM PUBLIK 5% ATAU LEBIH DARI SELURUH MODAL SAHAM YANG DISETOR

BAGIAN C : DAFTAR CABANG/BADAN ANGGOTA KOPERASI

NO.	NAMA DAN ALAMAT	TERHITUNG SEJAK TANGGAL	N P W P	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

KP. PPh 2.2.5-99

LAMPIRAN - VI

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR
1771 - VI

PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL
DAN
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

TAHUN PAJAK

NAMA WAJIB PAJAK : ..... NPWP :

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL

NO.	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO / NILAI TRANSAKSI (Rp)	TARIF (%)	PPh FINAL YANG SEHARUSNYA TERUTANG MELALUI (Rp)		
				PEMOTONGAN /PEMUNGUTAN (3 x 4)	PEMBAYARAN SENDIRI (3 x 4)	JUMLAH (5 + 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	a. BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN DAN DISKONTO SBI b. HADIAH UNDIAN c. BUNGA SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI d. BUNGA ATAU DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL DI BURSA EFEK					
2.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK a. SAHAM PENDIRI b. BUKAN SAHAM PENDIRI					
3.	PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA					
4.	a. PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK PERTAMINA DAN PREMIX b. PENYALUR / GROSIR TEPUNG TERIGU DAN GULA PASIR (BULOG) c. PENYALUR / DISTRIBUTOR ROKOK					
5.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN					
6.	PERSEWAAN ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN					
7.	USAHA JASA KONSTRUKSI a. PELAKSANAAN DAN PERENCANAAN KONSTRUKSI b. PENGAWASAN KONSTRUKSI					
8.	USAHA JASA KONSULTAN, KECUALI KONSULTAN HUKUM DAN KONSULTAN PAJAK					
9.	LAIN - LAIN					
10.	JUMLAH					

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

(DALAM RIBUAN)

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	
2.	HIBAH	
3.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN	
4.	DIVIDEN/BAGIAN LABA YANG DITERIMA DARI PT.	
5.	BUNGA OBLIGASI YANG DITERIMA PERUSAHAAN REKSADANA	
6.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA	
7.	LAIN - LAIN	
	JUMLAH	

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.

KP. PPh 2.2.6-99

KANTOR PELAYANAN PAJAK

LEMBAR PENGAWASAN ARUS DOKUMEN

Nomor :
Tanggal :

Nama :
Alamat :

N.P.W.P :
No. P.K.P :
Ms/Thn pajak :

Jenis Pajak :

TEMPAT PELAYANAN TERPADU	
Uraian	**Prf/Tg**
Surat diterima : 1. langsung	.....
2. melalui pos	.....

Uraian	Prf / Tg
Diteruskan ke :	
1. Seksi :	.....
2. Diterima Seksi	.....
3. Selesai diproses	.....

Uraian	Prf / Tg
PENYIDIKAN	
1. Diberitahukan kepenuntut umum	.....
2. Penyidikan	.....
3. Selesai disidik	.....
4. Disampaikan kepenuntut umum	.....
PENETAPAN	
1. S T P	.....
2. S K P N	.....
3 S K P K B	.....
4. S K P K B T	.....
5. S K P L B	.....
RESTITUSI	
1. S K P K P P	.....
2. S P M K P	.....
PENGARSIPAN	
1. Dimasukkan keinduk berkas	.....
2. Diteruskan ke :	.....
3. Diterima kembali	.....

SEKSI TERKAIT	
Uraian	**Prf / Tg**
Diteruskan ke :	
1. Seksi :	.....
2. Diterima Seksi	.....
3. Selesai diproses	.....
Diteruskan ke :	
1. Seksi :	.....
2. Diterima Seksi	.....
3. Selesai diproses	.....
Diteruskan ke :	
1. Seksi :	.....
2. Diterima Seksi	.....
3. Selesai diproses	.....

PENGELOLAAN
SPT. Tahunan PPh / masa PPN

Uraian	Prf / Tg
PENGOLAHAN SPT	
1. Dicatat pada 1Q - 1	.....
2. Selesai di-Edit	.....
3. Selesai direkam	.....
4. Dicatat pada 1Q - 2	.....
PEMERIKSAAN	
6. Lengkap	.....
7. Sederhana :	
7.1. Lapangan	.....
7.2. Kantor	.....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon : Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

Nama :
Alamat :

N.P.W.P :
No. P.K.P :
Ms/Thn Pajak :

Jenis Pajak :

Petugas penerima,

NIP :

KP. PDIP 3.16 - 96

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG TEGALLEGA

LEMBAR PENGHITUNGAN

(X) STP ( ) SKP ( ) SKPT ( ) SKKP

I. PERIHAL

NAMA WAJIB PAJAK :

N P W P : ☐☐☐☐☐☐☐ 4 2 2

ALAMAT :

II. URAIAN

Berdasarkan data administrasi Pengawasan Pembayaran dan Pengawasan Laporan :

Wajib pajak tersebut diatas tidak / terlambat menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan/PPh Orang Pribadi/PPh Pasal 21, Tahun Pajak : 20.....

Dari uraian ini sesuai dengan UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994, diusulkan untuk diterbitkan STP dengan perhitungan sebagai berikut :

Sanksi Denda / Bunga UU No. 9 Tahun 1994

Pasal 7 : Rp. 50.000,-

JUMLAH Rp. 50.000,-

(Lima puluh ribu rupiah)

Bandung, ... 20 .....

DITELITI
KASUBSI SPT

PENGHITUNG

Nip.

Nip.

MENYETUJUI/MENETAPKAN
KEPALA SEKSI TUP

Nip.

Lampiran 4

KODE NOTA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
BANDUNG - TEGALLEGA

NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

[1] STP [2] SKPKB [3] SKPKBT [4] SKPLB [5] SKPN

Jenis Pajak : [1] ORANG PRIBADI [2] BADAN

Nomor Ketetapan/Keputusan :
Tgl. Penerbitan :
Tgl. Jatuh Tempo :

Masa Pajak :
No. Tanggal Permohonan (LB) :
Tgl. SPT Lengkap Disampaikan :
Tgl. Pemeriksaan :
Tahun Pajak :
Tahun Buku :
No. LPP/LHPM :

Nama :
NPWP :
Pekerjaan / Usaha :
Alamat :
KLU (5 digit) :
Kode Pos :

Cara Penghitungan Penghasilan [a] Pembukuan / [b] Norma Penghitungan

URAIAN	JUMLAH MENURUT	
	WAJIB PAJAK	FISKUS
1. Peredaran Usaha		
2. Harga Pokok Penjualan		
3. a. Laba / Penghasilan Bruto usaha (1-2) atau penghasilan Neto dari usaha b. Penghasilan jasa / pekerjaan bebas		
c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan		
d. Jumlah (a + b + c)		
4. Pengurangan Penghasilan bruto/biaya perusahaan, biaya jabatan/pensiun iuran pensiun, dan iuran THT		
5. Jumlah penghasilan neto : dari usaha / sehubungan dengan pekerjaan (3.d. - 4)		
6. Penghasilan dari luar usaha :		
a. Penghasilan Neto luar negeri		
b. Penghasilan Neto : dari luar usaha / penghasilan lainnya		
c. Jumlah (a + b)		
7. Jumlah Penghasilan Neto (5 + 6.c.)		
8. a. Kompensasi kerugian b. Penghasilan Tidak Kena Pajak		
9. Penghasilan Kena Pajak (7 - 8.a. - 8.b.)		
10. PPh Terutang		

KP.PPh. 0/BNP-95

URAIAN	JUMLAH MENURUT	
	WAJIB PAJAK	FISKUS
11. Kredit Pajak : a. Dipotong / dipungut oleh pihak lain : a.1. PPh Pasal 21		
a.2. PPh Pasal 22		
a.3. PPh Pasal 23		
a.4. Lain - lain		
a.5. Jumlah (a.1. + a.2. + a.3. + a.4.)		
b. Dibayar sendiri b.1. PPh Pasal 22		
b.2. PPh Pasal 24		
b.3. PPh Pasal 25		
b.4. PPh Pasal 29		
b.5. Lain - lain		
b.6. Jumlah (b.1. + b.2. + b.3. + b.4. + b.5.)		
c. Diperhitungkan c.1. STP (Pokok)		
c.2. SKPKB (Pokok)		
c.3. SKPKBT (Pokok)		
c.4. SKPLB		
c.5. Jumlah (c.1. + c.2. + c.3. + c.4.)		
d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a.5. + b.6. + c.5)		
12. Pajak Penghasilan yang : [a.] Kurang bayar (10 - 11.d.) / [b.] Lebih bayar (11.d. - 10) / [c.] NIHIL (10 = 11.d.)		
13. Sanksi administrasi : a. STP a.1. Denda Pasal 7 KUP		
a.2. Denda Pasal 8 (2) KUP		
a.3. Bunga Pasal 8 (3) KUP		
a.4. Bunga Pasal 19 (1) atau Pasal 19 (2) KUP		
a.5. Bunga Pasal 19 (3) atau Pasal 14 (3) KUP		
b. SKPKB b.1. Kenaikan Pasal 8 (5) KUP		
b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) hurup b KUP		
b.3. Bunga Pasal 13 (2) KUP		
c. SKPKBT c.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP		
c.2. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)		
14. Jumlah yang : [a.] Masih harus dibayar (12 + 13.d.) / [b.] Lebih bayar (12.b.) / [c.] NIHIL (12.c.)		
(..... .....)		

DIHITUNG	DITELITI	DISETUJUI	DITETAPKAN	PENOMORAN	DATA ENTRY	KONTROL KELUAR	EKSPEDISI	ARSIP

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lampiran 5

KANTOR PELAYANAN PAJAK :

BEBAS BEA

KEPADA

Yth. :

SURAT TEGORAN

No. :

NPWP :

Menurut tata usaha kami Saudara belum menyampaikan Surat Pem – beritahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang batas waktu penyampaiannya adalah tanggal

Surat Pemberitahuan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu **30 (tiga puluh) hari** sejak tanggal Surat Tegoran ini.

Untuk menghindarkan dari pengenaan sanksi administrasi berupa ke – naikan pajak yang akan memberatkan Saudara, maka diminta agar Saudara me – nyampaikan SPT Tahunan PPh dalam jangka waktu tersebut diatas.

A. n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

NIP

KP. PPh. 1.5 - 90

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT TAGIHAN PAJAK

PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI / BADAN

Nomor :

Masa / Tahun Pajak :

Tanggal Penerbitan : Tanggal jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang No. 9 Tahun 1994 jo. Undang-undang No. 10 Tahun 1994 telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan :

Nama :

NPWP :

II. Dari penelitian dan / atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Angsuran Pajak / Pokok Pajak yang harus dibayar		Rp.
2. Telah dibayar		Rp.
3. Kurang dibayar		Rp.
4. Sanksi Administrasi :		
a.	Rp.	
b.	Rp.	
c.	Rp.	
d. Jumlah sanksi administrasi		Rp.
5. Jumlah yang masih harus dibayar (3 + 4.d)		Rp.

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

LEMBAR **1**

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK (S S P)

Untuk arsip WP

NPWP : ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐ - ☐ - ☐☐☐ *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : .....

Alamat WP : .....

..... Kode Pos ☐☐☐☐☐

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
0 1 ☐ ☐	☐☐☐	.....
Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1		.....
		.....

Setoran : ☐ Masa ☐ Tahunan ☐ Final ☐ STP ☐ SKPKB ☐ SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Tahun
Diisi tahun Pajak setoran dimaksud
☐☐☐☐

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : ☐☐☐☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐ / ☐☐

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp. .....

Terbilang : .....

Diisi dengan huruf .....

.....

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro	Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal	....., tgl .....
Cap dan tanda tangan	*Cap dan tanda tangan*
Nama Jelas :	Nama Jelas : .....

**) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*
Tambahan Informasi :
- *Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek*
- *Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek*

KP. PDIP. 5.1.-98

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

LEMBAR **2**

Untuk KPP melalui KPKN

NPWP : ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐ - ☐ - ☐☐☐ *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : .....

Alamat WP : .....

..... Kode Pos ☐☐☐☐☐

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
0 1 ☐☐	☐☐☐	.....
Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1		.....
		.....

Setoran : ☐ Masa ☐ Tahunan ☐ Final ☐ STP ☐ SKPKB ☐ SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Tahun
Diisi tahun Pajak setoran dimaksud
☐☐☐☐

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : ☐☐.☐☐☐☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐ / ☐☐

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp. .....

Terbilang : .....

Diisi dengan huruf .....

.....

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro	Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal	....., tgl .....
Cap dan tanda tangan	*Cap dan tanda tangan*
Nama Jelas :	Nama Jelas : .....

**) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*
Tambahan Informasi :
- *Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek*
- *Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek*

KP. PDIP. 5.1.-98

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

LEMBAR **3**

Untuk dilaporkan oleh WP ke KPP

NPWP : ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐ - ☐ - ☐☐☐ *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : .....

Alamat WP : .....

..... Kode Pos ☐☐☐☐☐

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
0 1 ☐ ☐	☐☐☐	.....
Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1		.....
		.....

Setoran : ☐ Masa ☐ Tahunan ☐ Final ☐ STP ☐ SKPKB ☐ SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Tahun
Diisi tahun Pajak setoran dimaksud
☐☐☐☐

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : ☐☐☐☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐ / ☐☐

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp. .....

Terbilang : .....

Diisi dengan huruf .....

.....

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro	Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal	....., tgl .....
Cap dan tanda tangan	*Cap dan tanda tangan*
Nama Jelas :	Nama Jelas : .....

**) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*
Tambahan Informasi :
- *Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek*
- *Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek*

KP. PDIP. 5.1.-98

LEMBAR **4**

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

NPWP : ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐ - ☐ - ☐☐☐ *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : .....

Alamat WP : .....

..... Kode Pos ☐☐☐☐☐

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
0 1 ☐ ☐	☐☐☐	.....
Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1		.....
		.....

Setoran : ☐ Masa ☐ Tahunan ☐ Final ☐ STP ☐ SKPKB ☐ SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Tahun
Diisi tahun Pajak setoran dimaksud
☐☐☐☐

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : ☐☐☐☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp. .....

Terbilang : .....

Diisi dengan huruf .....

.....

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

Wajib Pajak/Penyetor
....., tgl .....
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

*) *Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*
Tambahan Informasi :
- *Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek*
- *Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek*

KP. PDIP. 5.1.-98

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

LEMBAR **5**

Untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain

NPWP : ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐ - ☐ - ☐☐☐ *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : .....

Alamat WP : .....

..... Kode Pos ☐☐☐☐☐

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
0 1 ☐ ☐	☐☐☐	.....
Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1		.....
		.....

Setoran : ☐ Masa ☐ Tahunan ☐ Final ☐ STP ☐ SKPKB ☐ SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun
Diisi tahun Pajak setoran dimaksud
☐☐☐☐

Nomor Ketetapan : ☐☐☐☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐ / ☐☐

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp. .....

Terbilang : .....

Diisi dengan huruf .....

.....

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro	Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal	....., tgl .....
Cap dan tanda tangan	*Cap dan tanda tangan*
Nama Jelas :	Nama Jelas : .....

**) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*
Tambahan Informasi :
- *Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek*
- *Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek*

KP. PDIP. 5.1.-98

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH IX JAWA BAGIAN BARAT II
KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG TEGALLEGA
Jln. Soekarno Hatta No. 216 Bandung

Lampiran 8

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi
UNIKOM
di Bandung

13 Februari 2002

SURAT KETERANGAN
Nomor: KET- 146 / WPJ.09/KP.0601 2002

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: NISCAHYA NINGSIH
NPM	: 213.99027
Jurusan	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi

telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega mulai tanggal 3 September 2001 sampai dengan tanggal 30 September 2001.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kepala Kantor
U.b. Kasubbag. Umum
U.b. Korlak Kepegawaian

KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG TEGALLEGA

YAYIR HASAN SANTOSA
NIP. 060031821

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 114-116 TELP. (022) 2506634, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506637, FAX. 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TL. (022) 2503054, 2500553, 2500905 BANDUNG 40132

Surat Tugas Membimbing Kerja Praktek
No: 196 /Dekan/Int/FE/ × /2001

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia dengan ini memberi tugas membimbing kerja praktek kepada :

1. Nama : Ony Widilestariningtyas, SE
   Sebagai Pembimbing

Dalam penyusunan/penelitian laporan kerja praktek untuk dan atas :

Nama : Niscahya Ningrum
NIM/Jurusan : 21399027/Akuntansi
Program Studi : D-III
Judul : Penatausahaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegalega.

Surat tugas ini berlaku sampai dengan laporan kerja praktek selesai paling lambat 6 (enam) bulan setelah penetapan surat tugas ini.
Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 30 Oktober 2001
Dekan,

Prof. Dr. Hj. Ria Ratna Ariawati, MS., Ak

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Rektor UNIKOM.
2. PR I & PR II UNIKOM.
3. Ketua Jurusan Akuntansi.
4. Kepala BAAK UNIKOM.
5. Pembimbing.
6. Arsip

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIKOM
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 114-116 TELP. (022) 2506634, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506637, FAX. 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TL. (022) 2503054, 2506553, 2508805 BANDUNG 40132

Surat Keterangan Hasil Kuliah Kerja Praktek
Dari Perusahaan / Instansi

Yang bertanda tangan dibawah ini Personil Pembina KKP :

Nama	KUSNA ARDIANSYAH
Jabatan	KASUBSI SPT
Nama Perusahaan	KPP BANDUNG TEGALLEGA
Alamat Perusahaan	JL. SOEKARNO HATTA NO.216
	TEP. 6030566 BANDUNG

Menyatakan bahwa :

Nama	NISCAHYA NINGSIH
NIM / NIRM	21399027/43B634039907B4
Jurusan / Jenjang	AKUNTANSI/D III

Telah melaksanakan Kuliah Kerja Praktek (KKP) pada perusahaan / instansi kami, terhitung mulai tanggal 3SEPTEMBER2001 sampai dengan tanggal 28SEPTEMBER2001..., pada Bidang Kajian : PERPAJAKAN
Adapun hasil Kuliah Kerja Praktek mahasiswa yang bersangkutan dapat kami laporkan sbb :

Materi Penilaian :	Nilai (dalam angka 0 s/d 100)
1. Kedisiplinan	(84)
2. Penguasaan Materi Pekerjaan	(84)
3. Kreativitas	(82)
4. Laporan	(90)
Total Nilai	...

Nilai Rata – rata : $\frac{\text{Total Nilai}}{4} = \frac{340}{4} = 85$

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, untuk pertimbangan hasil/nilai Kuliah Kerja Praktek mahasiswa yang bersangkutan.
Atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Bandung, FEBUARI 2002

Mengetahui,
Pimpinan Perusahaan

(DRS. NURACHMAN)

Personal Pembina,

(KUSNA ARDIANSYAH)

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIKOM
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 114-116 TELP. (022) 2506034, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506637, FAX. 2503754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TL. (022) 2503054, 2506953, 2508805 BANDUNG 40132

SURAT KETERANGAN HASIL KULIAH KERJA PRAKTEK
Dari Dosen Pembimbing

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing KKP :

Nama : ONY MIDILESTARI INGTYAS, SE.
NIP : 4127.34.03.004
Jabatan : DOSEN JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

Menyatakan bahwa :

Nama : NISCAHYA NI'MSI
NIM / NIRM : 21399027/45B634039900704
Jurusan / Jenjang : AKUNTANSI/D III

Telah melaksanakan Kuliah Kerja Praktek, terhitung mulai tanggal 3 SEPTEMBER 01 Sampai dengan tanggal 28SEPTEMBER2001. pada Bidang Kajian : PERPAJAKAN

Adapun hasil Kuliah Kerja Praktek mahasiswa yang bersangkutan dapat kami laporkan sbb :

Materi Penilaian	Nilai (dengan angka 0 – 100)	Nilai Akhir *)
1. Kedisiplinan	(85)	A = Sangat Baik
2. Penguasaan Materi Pekerjaan	(85)	B = Baik
3. Kreativitas	(90)	C = Cukup
4. Laporan	(90)	D = Kurang
Total Nilai	(350)	E = Gagal

Nilai Rata -- rata : Total Nilai / 4 = 350 / 4 = 87,5

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu.

Atas kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Bandung, FEBRUARI 2002
Dosen Pembimbing

Ony Midilestariningtyas,-

ONY MIDILESTARININGTYAS, SE.

*) Lingkari yang cocok


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM

RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama	: Niscahya Ningsih
Tempat/Tanggal lahir	: Bandung, 29 Juni 1981
Agama	: Islam
Status	: Mahasiswi
Alamat	: Jl. Raya Cibabat No.333 Blok C/79 RT.02/Rw.12 Cimahi 40522
Hobi	: Jalan-jalan, nonton dan dengerin musik

Data Pendidikan

Tahun 1993	: Lulus SD, SDN Sosial I Cigugur Tengah.
Tahun 1996	: Lulus SMP, SMP Pasundan 3 Cimahi.
Tahun 1999	: Lulus SMU, SMU Pasundan 7 Bandung.
Tahun 1999	: Tercatat sebagai mahasiswa Program Studi D-III Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.